

The Effect of Local Revenue and Special Allocation Funds on the Human Development Index in District and Cities in Lampung Province in 2016-2019

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2016-2019

Eka Jatmiko Sulistio Wati¹⁾, Eksa Ridwansyah²⁾, Anita Kusuma Dewi³⁾

*^{1,2,3)}Program Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung
e-mail: ekajatmikosulistiowati34908@gmail.com, eksaridwansyah@polinela.ac.id, anitakusumadewi@polinela.ac.id*

Abstract

This study aims to determine the effect of local revenue and special allocation funds on the human development index. This study uses a non-probability sampling technique, namely saturated samples. The population used in this study were 15 districts and cities in Lampung Province. This study uses secondary data from www.bps.go.id. Data analysis used descriptive analysis test, classical assumption test, multiple linear analysis test, coefficient of determination test, and t test (partial) with the test tool used was SPSS.V.25.0. The results of this study indicate that Local Revenue has an effect on the Human Development Index while for the variable Special Allocation Funds have no effect on the Human Development Index.

Keywords: *Human Development Index, Local Revenue, Special Allocation Funds*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang melakukan pembangunan di berbagai bidang, meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur (Lohonauman, 2016). Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Keberhasilan negara dalam mencapai cita-cita tersebut dapat dilihat melalui pembangunan manusia yang berhasil (Sulastri & Efendri, 2021). Keberhasilan pembangunan manusia suatu bangsa atau

wilayah dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) (Raviyanti *et al.* 2017).

Indonesia memiliki perkembangan IPM yang baik selama tahun 2016-2019. Dimana angka IPM indonesia terus mengalami peningkatan pada tahun tersebut (BPS, 2020). Perkembangan yang terus meningkat tersebut ternyata belum dapat memberikan kontribusi untuk Indonesia dalam mendapatkan peringkat yang bagus di dunia maupun di ASEAN. Hal tersebut didasarkan pada IPM Indonesia versi UNDP yang berada pada peringkat 111 dunia dan 6 ASEAN pada tahun 2019, 2 yang berarti

bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina (BPS, 2020).

Sistem pemerintahan di Indonesia sejak tahun 2001 menganut sistem desentralisasi atau dikenal sebagai Otonomi Daerah, pada sistem ini pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya dengan meminimalkan intervensi dari pemerintah pusat. Sistem otonomi daerah juga diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan daerah (Williantara & Budiasih, 2016). Pelaksanaan pembangunan tentunya akan membutuhkan biaya (Arifin & Azizah, 2022). Pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber utama dari pendapatan daerah (Hasan & Agung, 2018). PAD antar daerah di Indonesia memiliki perbedaan jumlah yang cukup signifikan (Hasan & Agung, 2018). Perbedaan jumlah PAD serta potensi antar daerah menyebabkan pembangunan tidak merata, sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan (Lestari *et al.*, 2019).

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi paling selatan pulau Sumatera yang sangat strategis bagi lalu lintas perekonomian Indonesia dan menjadi pintu ekspansi ekonomi dari pulau Sumatera ke pusat perekonomian nasional di Jakarta dan juga memiliki peran penting dalam lalu lintas perekonomian kawasan Asia Tenggara terutama klaster Sijori (Singapura, Johor, Riau) (Chaniago, 2021). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi

Lampung 5 dilihat dari lampiran 1 berada pada posisi ke 24 dalam perbandingan seluruh provinsi di Indonesia tahun 2016-2019 dengan rata-rata IPM 68,62. Sedangkan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung berada pada peringkat ke 14 tahun 2016- 2019 dengan rata-rata Pendapatan Daerah sebesar Rp6.692.060 juta. Peringkat tersebut menyatakan bahwa terdapat 12 provinsi dengan Pendapatan Daerah di bawah Provinsi Lampung, namun peringkat IPM-nya di atas Provinsi Lampung. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang tinggi belum tentu dapat membuat masyarakat sejahtera berdasarkan IPM, begitu juga sebaliknya.

Pengalokasian dana pendapatan daerah yang sesuai dengan kegunaannya tentu akan mempengaruhi dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada setiap daerah tersebut (Sulastri & Efendri, 2021). Penelitian mengenai pengaruh pendapatan daerah terhadap IPM ini telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya Rahmayati & Pertiwi (2018), Williantara & Budiasih (2016), Lestari *et al.* (2019), Siburian *et al.* (2021), dan Sarkoro & Zulfikar (2016).

Rumusan dalam penelitian ini yaitu: Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung? Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung? Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi

Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

Kajian Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) dalam Syafira et al (2022) menyatakan “*agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”. Teori ini menunjukkan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu bentuk persetujuan (kontrak) di antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen, untuk melaksanakan suatu pekerjaan atas nama prinsipal yang mana untuk mengambil keputusan diberikan wewenang kepada agen. Teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan masyarakat.

Gambaran hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu, pemerintah pusat sebagai prinsipal yang menyalurkan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk membantu mendanai kebutuhan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pemerintah daerah itu sendiri. Gambaran hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat yaitu, masyarakat sebagai prinsipal yang membayar pajak, retribusi dan lain-lain kepada pemerintah daerah sebagai agen

yang berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemudian pemerintah daerah selaku pengelola keuangan daerah memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri Sarkoro & Zulfikar (2016).

Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Sarkoro & Zulfikar (2016) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2022) IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut UNDP dalam Badan Pusat Statistik (2020), IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM sebagai ukuran kualitas hidup dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu: Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), dan Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. PAD adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Mustoffa, 2018).

Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dikhususkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian

ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu sampel jenuh. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel (Syafina, 2019). Penelitian ini memiliki populasi sebanyak 15 kabupaten/kota yang dijadikan sebagai sampel selama 4 tahun, sehingga diperoleh 60 data untuk diuji. Sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

No	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota
1	18.01	Kabupaten Lampung Selatan
2	18.02	Kabupaten Lampung Tengah
3	18.03	Kabupaten Lampung Utara
4	18.04	Kabupaten Lampung Barat
5	18.05	Kabupaten Tulang Bawang
6	18.06	Kabupaten Tanggamus
7	18.07	Kabupaten Lampung Timur
8	18.08	Kabupaten Way Kanan
9	18.09	Kabupaten Pesawaran
10	18.10	Kabupaten Pringsewu
11	18.11	Kabupaten Mesuji
12	18.12	Kabupaten Tulang Bawang Barat
13	18.13	Kabupaten Pesisir Barat
14	18.71	Kota Bandar Lampung
15	18.72	Kota Metro

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersumber dari www.bps.go.id berupa Laporan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2016-2019 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia yaitu berupa Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2016-2019.

Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis variabel dalam penelitiannya, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai Y. Variabel kedua yaitu variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap variasi dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai X1 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai X2.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam penelitian ini diproksikan melalui angka

capaian IPM setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2016- 2019. Data IPM diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam dokumen Indeks Pembangunan Manusia tahun 2016-2019

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini diproksikan melalui rasio realisasi PAD terhadap realisasi total Pendapatan Daerah setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2016-2019 dalam satuan ribu rupiah. Data PAD dan total Pendapatan Daerah diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah dalam dokumen Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2016-2019. Rasio PAD berdasarkan pada penelitian Sarkoro & Zulfikar (2016) dirumuskan dengan:

$$PAD = \frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penelitian ini diproksikan melalui rasio total realisasi DAK terhadap realisasi total Pendapatan Daerah setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2016-2019 dalam satuan ribu rupiah. Data DAK dan total Pendapatan Daerah diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah dalam dokumen Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2016-2019. Rasio DAK berdasarkan pada penelitian Sarkoro & Zulfikar (2016) dirumuskan dengan:

$$\text{DAK} = \frac{\text{Total Realisasi Dana Alokasi Khusus}}{\text{Realisasi total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis dan Uji Hipotesis

Analisis Statistik Deskriptif

Jumlah data sampel yaitu sejumlah 60 data dengan hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut: a). Hasil analisis deskriptif pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM = Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 60,720000 pada Kabupaten Mesuji tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 77,330000 pada Kota Bandar Lampung tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) sebesar 67,56050000 dan nilai standar deviasi sebesar 4,033191286; b). Hasil analisis deskriptif pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,016333 pada Kabupaten Tanggamus tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 0,294419 pada Kota Bandar Lampung tahun 2017. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,07583332 dan nilai standar deviasi sebesar 0,062130904; c). Dana Alokasi Khusus (DAK = X4) Hasil analisis deskriptif pada variabel DAK (X4) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,107266 pada kota Bandar Lampung tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 0,274311 pada Kabupaten Lampung Barat tahun 2016. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,17866928 dan nilai standar deviasi sebesar 0,041219179.

Uji Asumsi Klasik

Hasil penelitian ini telah lulus uji asumsi klasik, dimana hasil uji normalitas dengan P-P

Plot diketahui bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* memperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 > 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi secara normal. Hasil uji multikolinearitas variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh nilai *Tolerance* sebesar 0,737 dan nilai VIF sebesar 1,357. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memperoleh nilai *Tolerance* sebesar 0,759 dan nilai VIF sebesar 1,318. Hasil dari masing-masing variabel memperoleh nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga hasil uji multikolinearitas pada data penelitian ini dapat dinyatakan terbebas dari multikolinearitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu serta menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada Y dan X. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik terakhir yaitu uji autokorelasi. Diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 2,035 tersebut terletak di antara nilai dU (1,7274) dan 4-dU (2,2726), sehingga dapat menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda (*Unstandardized Coefficients*)

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	62,161	5,438		11,430	,000
	PAD	57,977	5,208	,893	11,131	,000
	DAK	10,949	7,738	,112	1,415	,163

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Hasil SPSS v.25.0 (Data diolah 2023)

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 62,161 + 57,977X_1 + 10,949X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: a).

Nilai konstanta diperoleh sebesar 62,161. Hasil tersebut dapat diartikan apabila semua variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD=X₁) dan Dana Alokasi Khusus (DAK=X₄) dianggap konstan atau bernilai 0, maka variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM=Y) memiliki nilai sebesar 62,161; b). Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh nilai koefisien sebesar 57,977 dengan arah hubungan positif. Hasil tersebut dapat diartikan apabila nilai PAD mengalami kenaikan satu tingkatan, maka nilai Indeks pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami kenaikan sebesar 57,977 dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau tetap; c). Dana Alokasi Khusus (DAK) memperoleh nilai koefisien sebesar 10,949 dengan arah hubungan positif. Hasil tersebut

dapat diartikan apabila nilai DAK mengalami kenaikan satu tingkatan, maka nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami kenaikan sebesar 10,949 dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,860 ^a	,739	,720

Sumber: Hasil SPSS v.25.0 (Data diolah 2023)

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square (R²) sebesar 0,720 yang artinya sebesar 72% faktor-faktor dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan melalui variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan sebesar 28% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti

dalam penelitian ini.

Uji t (Uji Parsial)

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients ^a			
Standardized Coefficients			
Model	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	11,430	,000
	PAD	,893	11,131 ,000
	DBH	-,140	-1,999 ,051
	DAU	,013	,164 ,870
	DAK	,112	1,415 ,163

Sumber: Hasil SPSS v.25.0 (Data diolah 2023)

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut: a). Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 11,131 dan nilai signifikan (Sig. t) sebesar 0,000. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} atau ($11,130 > 2,00404$) dan nilai Sig. t lebih kecil dari nilai α atau ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti bahwa PAD secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM); b). Dana Alokasi Khusus (DAK) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,415 dan nilai signifikan (Sig. t) sebesar 0,163. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} atau ($1,415 < 2,00404$) dan nilai Sig. t lebih besar dari nilai α atau ($0,163 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak, yang berarti bahwa variabel DAK tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} atau ($11,131 > 2,00404$) dengan nilai signifikan lebih kecil dari nilai α atau ($0,000 < 0,05$), artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. PAD memiliki pengaruh terhadap IPM disebabkan karena PAD dapat digunakan untuk memenuhi belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dari daerah masing-masing, karena penggunaannya tidak terikat oleh peraturan pemerintah pusat, tidak seperti dana perimbangan yang sebagian besar sudah ditentukan penggunaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan PAD itu sendiri, yaitu bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Siburian *et al.*, 2021). Kewenangan tersebut akan mempermudah pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. PAD banyak digunakan untuk belanja daerah baik belanja modal maupun belanja rutin yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmayati & Pertiwi, 2018).

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayati & Pertiwi (2018), Siburian *et al.* (2021) dan

Munfarida & Priyojadmiko (2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Williantara & Budiasih (2016) dan Patadang *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap IPM.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial menunjukkan nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel atau ($1,415 < 2,00404$) dengan nilai signifikan lebih besar dari nilai α atau ($0,163 > 0,05$), artinya variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan demikian hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi menjadi 2, yaitu DAK fisik dan DAK *non*-fisik. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK fisik terdiri dari DAK fisik reguler, DAK fisik penugasan, dan DAK fisik afirmasi meliputi bidang: pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dan pemukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pasar, energi skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan, dan transportasi. Sedangkan DAK *non*-fisik menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 119/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus *Non*-Fisik, terdiri dari: dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini 46 (PAUD), dana BOP kesehatan, dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana Tambahan Penghasilan Guru (TPG) PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, dan DAK *non*-fisik jenis lainnya.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik disalurkan melalui belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, sedangkan untuk DAK *non*-fisik disalurkan melalui belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Pengalokasian belanja tersebut disesuaikan dengan bidang yang telah diatur oleh pemerintah pusat melalui anggaran DAK fisik dan DAK *non*-fisik. Berdasarkan Realisasi Pendapatan Daerah di Provinsi Lampung tahun 2016-2019, Provinsi Lampung selama tahun 2016-2019 mendapatkan DAK *non*-fisik dari pemerintah pusat hanya pada tahun 2018, sedangkan untuk DAK fisik rutin didapatkan setiap tahunnya selama tahun 2016-2019.

Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disebabkan karena DAK yang dianggarkan oleh pemerintah dominan DAK fisik yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana. Hal

tersebut diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa DAK digunakan khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pembangunan DAK fisik tidak dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung melainkan akan terlihat dalam jangka waktu yang panjang, walaupun DAK fisik digunakan terutama untuk pembangunan infrastruktur publik bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pelayanan umum lainnya yang termasuk bidang pembangunan manusia. Sehingga akan sulit untuk melihat pengaruh DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari penelitian selama 4 tahun (2016-2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayati & Pertiwi (2018), Hasan & Agung (2018) dan Sarkoro & Zulfikar (2016) yang memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung; dan

(2) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung.

Saran

Berdasarkan hasil uji dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yaitu: (1) Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambahkan beberapa variabel yang akan diteliti; dan (2) Peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode penelitian untuk dapat melihat pengaruh dari Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana yang digunakan untuk pembangunan yang memberikan manfaat dalam jangka panjang

Daftar Pustaka

Jurnal

- Afirin, A. dan Azizah, S.N. 2022. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020). *E-Qien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), pp. 461-467.
- Hasan, M.A. dan Agung, M.F.S. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Riau periode 2011-2015). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), pp. 190-203.
- Lestari, P., Sarfiah, S.N., dan Prasetyanto, P.K. 2019. Analisis Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap IPM di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu tahun 2012-2016.

- Dinamic: Directory Journal Of Economic*, 1(1), pp. 100-113.
- Lohonauman I.L. 2016. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA*, 4(1), pp. 172-180.
- Munfarida, S. dan Priyojadmiko, E. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Andalas Management Review*, 4(2), pp. 46-59.
- Mustoffa, A.F. 2018. Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. *ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), pp. 1-14.
- Patadang, T.M., Rotinsulu, T.O., dan Rorong, I.P.F. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minahasa Tenggara dengan Pengeluaran di Bidang Kesehatan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(2), pp. 132-149.
- Rahmayati, A. dan Pertiwi, I.F.P. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *JIFA: Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1), pp. 45-62.
- Raviyanti, A.A., Rahayu, S., dan Mahardika, D.P.K. 2017. Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2009-2013). *Jurnal Manajemen*, 22(2), pp. 243-256.
- Sarkoro, H. dan Zulfikar. 2016. Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintahan Provinsi se-Indonesia tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), pp. 54-63.
- Siburian, M.T., Abdullah, M.A., dan Firmansyah, A. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011- 2018. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(1), pp 1-26.
- Sulastri, E. dan Efendri. 2021. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Seluruh Provinsi di Kalimantan tahun Anggaran 2015-2019). *JRMB Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 6(2), pp. 85-96.
- Syafira, L., Harefa, K., Hidayat, Ok.S., dan Habibi, M.R. 2022. Analysis of PAD, DAU, DAK, DBH and Capital Expenditures and their Effect on the Human Development Index of North Sumatra Province. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya*, 8(1), pp. 80-89.
- Williantara, G.F. dan Budiasih, I.G.A.N. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), pp. 2044-2070. Badan Pusat Statistik. 2020. Indeks Pembangunan Manusia 2019.

Buku

- Syafina, Laylan. 2019. Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Publikasi Elektronik

- Badan Pusat Statistik. 2022. Indeks Pembangunan Manusia 2021.
- Chaniago, Teddy. (2021). Profil Provinsi Lampung. <https://buliran.com/10382/profil-provinsi-lampung.html>. [22 oktober 2022]
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaam Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.